

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH TAHUN 2015-2016.

Oleh :

Bimmo Faizal Risky – 14010112140123

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof. H. Soedarto. SH, Tembalang, Semarang. Kode Pos 1269

Website :<http://www.fisip.undip.ac.id>/Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan mengenai strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan investasi daerah Tahun 2015-2016 yang ditinjau dari faktor sosial, politik, administratif, dan ekonomi beserta hambatanannya. Dalam otonomi daerah, seluruh daerah di Indonesia diperkenankan mengatur urusannya masing-masing termasuk urusan perihal investasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang kemudian didukung oleh data primer yang diperoleh dari instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dan data sekunder yang diperoleh dari buku, laporan, jurnal, internet, media massa cetak. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi sosial yang dilakukan dalam meningkatkan investasi adalah dengan merutinkan sosialisasi kepada masyarakat di daerah-daerah yang ‘bermasalah’ tentang pentingnya investasi, strategi politik adalah menjaga stabilitas politik, strategi administratif yang dilakukan adalah memangkas regulasi perizinan, strategi ekonomi adalah menciptakan tenaga kerja yang berkompeten namun dengan gaji tidak terlalu tinggi.

Kata Kunci : Strategi meningkatkan investasi, Investasi daerah dan Peningkatan investasi.

ABSTRACT

This study was conducted to elucidate the strategies undertaken by local governments to increase investment Tegal regency for the year 2015-2016 which are reviewed areas of social, political, administrative, and economic as well as its resistance. In autonomous regions, all regions in Indonesia allowed to arrange their own affairs, including matters concerning investment.

This study used a qualitative approach is further supported by primary data obtained from the District Government Tegal regency and secondary data obtained from books, reports, journals, internet, newspaper. The data collection techniques using interviews and document study.

The results showed that a social strategy that is done to increase investment is to routinely dissemination to the public in the regions 'troubled' about the importance of investment, political strategy is to maintain political stability, strategies administrative done is cut licensing regulations, the economic strategy is to create competent labor but the salary is not too high.

Keyword : Strategy to Increase Investment, Local Investment and Increasing Investment

I. PENDAHULUAN

Investasi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara. Keberadaannya merupakan dasar dari perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena investasi menjadi salah satu kunci dalam setiap upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti perluasan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan. Hal demikian juga berlaku bagi daerah, Secara normatif, investasi daerah (*local investment*) dipahami sebagai salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Tak terkecuali di kalangan pemerintah daerah, timbul semacam kesadaran bahwa akselerasi pembangunan hanya dimungkinkan jika terdapat arus investasi yang signifikan.

Era otonomi daerah, keberhasilan daerah dalam meningkatkan daya saing investasinya sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam merumuskan strategi kebijakan yang berkaitan dengan investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, dan ketersediaan infrastruktur dalam arti luas karena era otonomi daerah, setiap daerah ‘dipersilahkan’ memformulasikan strategi perihal penanaman modal sesuai dengan karakteristik wilayahnya sendiri.

Pemerintah daerah Kabupaten Tegal melihat fakta tersebut di atas dituntut untuk bisa mengurus rumah tangganya sendiri tak terkecuali di bidang penanaman modal. Kabupaten Tegal merupakan daerah dengan potensi yang cukup banyak yang bisa dikembangkan karenanya menarik investor adalah salah satu solusi untuk menggali potensi-potensi tersebut. Hal tersebut dapat terwujud jika Pemerintah

daerah Kabupaten Tegal dapat memformulasikan strategi untuk menarik minat investor dengan tepat dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Penelitian ini menyoroti mengenai strategi sosial, politik, administratif, dan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tegal untuk meningkatkan investasi pada tahun 2015-2016. Seperti diketahui faktor sosial, politik, administratif, dan ekonomi sangat memengaruhi suatu iklim investasi. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai hambatan pemerintah daerah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan investasi.

II. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam karya ilmiah skripsi ini akan dipaparkan mengenai bagaimana iklim investasi di Kabupaten Tegal serta strategi yang dilakukan Kabupaten Tegal dalam meningkatkan investasi tahun 2015-2016 berdasarkan dari teori Pheni Chalid yaitu yang pertama posisi dan peran pemerintah dalam mengambil kebijakan penanaman modal yang meliputi faktor sosial, politik, administratif, ekonomi, yang kedua adalah pemetaan potensi ekonomi dan subsidi usaha, serta yang ketiga yaitu proposal spesifik investasi.

2.1. Iklim Investasi di Kabupaten Tegal

Iklim investasi di Kabupaten Tegal masih belum baik karena salah satu investor pertambangan batu di Kabupaten Tegal yaitu Bapak Edi Prayitno selaku direktur CV. Pro Limas masih mengeluh perihal penerbitan perizinan yang dianggap masih sulit, para investor masih merasa belum dipermudah dalam perizinan, perizinan yang dianggap sulit merupakan permasalahan utama yang

dihadapi investor di Kabupaten Tegal. Sebelum izin terbit, seorang investor perlu melengkapi syarat-syarat yang berlaku sesuai perizinan yang dibutuhkan, syarat-syarat tersebutlah yang dianggap menyulitkan karena perlu waktu lama sehingga bisa meningkatkan biaya operasional yang dikeluarkan investor

Pemerintah daerah Kabupaten Tegal menyadari benar pentingnya investasi, karenanya pemerintah daerah Kabupaten Tegal terus berupaya melakukan perbaikan pada regulasi perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah daerah Kabupaten Tegal terus berupaya memperbaiki semua kebijakan mengenai penanaman modal terutama adalah pada bidang perizinan salah satunya yaitu memindahkan kewenangan penerbitan izin prinsip penanaman modal yang awalnya di Kantor Penanaman Modal menjadi di Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu. Kebijakan yang terbaru adalah memangkas alur proses perizinan yakni memindahkan kewenangan penerbitan izin prinsip penanaman modal yang awalnya diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal berpindah kewenangannya pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sehingga semua perizinan diterbitkan hanya oleh satu SKPD saja yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Adanya kebijakan tersebut dianggap mempermudah seorang investor karena lebih efisien sehingga investor dapat mempersingkat waktu penerbitan perizinan karena lebih cepat dan menekan biaya operasional untuk penerbitan perizinan..

Permasalahan regulasi perizinan di Kabupaten Tegal belum tuntas, masih banyak keluhan oleh para investor yang merasa belum dipermudah oleh pemerintah daerah Kabupaten Tegal. Pemerintah daerah Kabupaten Tegal sudah melakukan

perbaikan regulasi perizinan yaitu semua jenis perizinan diterbitkan secara satu pintu oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sehingga dianggap lebih efektif dan efisien karena mempercepat proses perizinan dan menekan biaya operasional. Namun bagi pengusaha, penerbitan perizinan di Kabupaten Tegal masih sulit dan berbelit-belit karena walaupun perizinan semua yang menerbitkan hanya satu SKPD yaitu BP2T namun persyaratan untuk mengeluarkan suatu perizinan masih sulit dan perlu waktu lama serta persyaratan tersebut ada beberapa yang harus diurus diluar SKPD tersebut.

2.2. Peran dan Posisi Pemerintah

Peran Sekda Kabupaten Tegal dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Tegal cukup sentral karena Sekda bersama dengan Bupati Kabupaten Tegal berperan dalam penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tegal di bidang penanaman modal. Sekda juga berperan dalam penyusunan anggaran daerah atau yang dikenal dengan APBD (Anggaran Belanja Pemerintah Daerah). Selain itu tidak kalah penting, Sekda mempunyai peran strategis lainnya, sebagai puncak pimpinan tertinggi di birokrasi, Sekda mempunyai tugas yaitu pengkoordinasi antar lembaga atau instansi sehingga dalam konteks meningkatkan investasi daerah Kabupaten Tegal, Sekda Kabupaten Tegal mempunyai tanggung jawab besar berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam bidang investasi, Kabupaten Tegal mempunyai 2 (dua) SKPD yang menanganinya yaitu Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) dan Kantor Penanaman Modal (KPM). Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) adalah

SKPD yang menerbitkan perizinan yang diperlukan oleh investor, segala perizinan yang diperlukan seorang investor diurus oleh BP2T Kabupaten Tegal, sedangkan Kantor Penanaman Modal (KPM) adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal seperti promosi daerah, pendampingan investor, pemberian insentif kemudahan, dan lain-lain.

Secara keseluruhan, peran pemerintah daerah Kabupaten Tegal yang paling terasa tentu saja dibidang pembuatan kebijakan yang mempengaruhi dunia usaha secara keseluruhan, seperti kebijakan perpajakan, tenaga kerja, atau kemudahan persyaratan pendirian usaha baru, atau kebijakan yang berpengaruh terhadap industri tertentu. Melalui regulasi pemerintah, peta persaingan bisa berubah dalam sekejap. Tentunya regulasi atau deregulasi pada pemerintah daerah Kabupaten Tegal sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya perusahaan dalam melakukan terobosan-terobosan baru pada bidang industri yang digeluti.

Adapun disebutkan dalam buku karya Pheni Chalid yang berjudul “keuangan daerah investasi, dan desentralisasi”, hasil survei Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bekerja sama dengan Asia Foundation dan USAID terhadap persepsi dunia usaha mengenai daya tarik investasi di 200 Kabupaten/Kota di Indonesia, melalui pendekatan *The Analytical Hierarchy Proces* (AHP) memperlihatkan lima faktor yang dinilai menjadi daya tarik investasi suatu daerah yakni aspek kelembagaan (administratif), sosial politik budaya, ekonomi daerah, tenaga kerja, infrastruktur fisik. Berdasarkan konsep tersebut di atas maka

akan dipaparkan strategi sosial, politik, administratif, dan ekonomi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Tegal untuk meningkatkan investasi daerah.

A. Strategi Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Dalam Meningkatkan Investasi Tahun 2015-2016

Merupakan strategi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Tegal melihat pada kondisi sosial dalam daerah yang menggambarkan relasi pranata-pranata sosial dalam sistem sosial daerah. Adapun strategi tersebut adalah dengan menciptakan rasa aman bagi investor. Bentuknya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melalui Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal menjalankan salah satu fungsinya yaitu pembinaan dan pelaporan pengembangan penanaman modal, investor dihimbau untuk rutin melaporkan mengenai perkembangan bisnisnya agar dapat dibantu jika menghadapi masalah.

Masih dalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal Tahun 2016, salah satu penyebab tidak kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Tegal pada waktu yang lalu adalah karena masih adanya pemahaman yang tidak sama dari masyarakat akan arti pentingnya investasi bagi peningkatan ekonomi Kabupaten Tegal dan penciptaan lapangan kerja. Ini ditandai oleh adanya kendala seperti harga tanah yang tidak rasional, deskriminasi, serta penolakan lainnya yang menyebabkan penanam modal tidak dapat melakukan kegiatan investasi di Kabupaten Tegal. Fakta tersebut yang memprakarsai pemerintah daerah Kabupaten Tegal untuk giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai

arti pentingnya investasi supaya masyarakat Kabupaten Tegal dapat lebih terbuka terhadap investor.

B. Strategi Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Dalam Meningkatkan Investasi Tahun 2015-2016

Merupakan strategi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Tegal melihat pada faktor politik dalam daerah. Faktor politik umumnya berkaitan erat dengan stabilitas politik, dan kepastian hukum karena seperti diketahui perubahan-perubahan kepemimpinan (kepala daerah) atau bahkan hubungan eksekutif dan legislatif yang tidak harmonis seringkali berakibat terjadinya perubahan dalam keputusan politik yang akhirnya berdampak secara langsung terhadap kondisi bisnis. Adapun strategi tersebut yaitu dengan menciptakan stabilitas politik termasuk didalamnya yaitu hubungan eksekutif dan legislatif pemerintah daerah Kabupaten Tegal yang harmonis.

Bentuk keharmonisan tersebut dapat dilihat saat rapat Badan Anggaran (Banggar) penyusunan APBD Kabupaten Tegal tahun anggaran 2016. Sekda Kabupaten Tegal menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut pihak banggar DPRD Kabupaten Tegal dinilai sepaham dengan pihak eksekutif karena tidak ada pembahasan yang alot perihal anggaran yang diperuntukan perihal investasi. Beliau memberi contoh, saat pihak eksekutif mengusulkan anggaran atau dana untuk SKPD Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal dan Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal, maka pihak DPRD Kabupaten Tegal langsung menyetujuinya tanpa pembahasan yang alot.

C. Strategi Administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Dalam Meningkatkan Investasi Tahun 2015-2016

Strategi administratif adalah strategi untuk meningkatkan investasi daerah yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Tegal dalam menjalankan fungsi pemerintahan (kelembagaan). Kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Tegal dicerminkan melalui kemampuannya dalam hal pelayanan kepada masyarakat melalui aparatur pemerintah. Adapun strategi tersebut yaitu memangkas regulasi perizinan agar mempercepat investor mengurus perizinan penanaman modal.

Izin prinsip yang dulunya diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal, per September 2016 izin prinsip diterbitkan oleh Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbub) Tegal Nomor 24 Tahun 2016 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Tegal. Di dalam Perbub tersebut disebutkan bahwa izin penanaman modal yang meliputi izin prinsip penanaman modal, izin prinsip investasi penanaman modal, izin prinsip perluasan penanaman modal, izin prinsip penggabungan penanaman modal, izin prinsip perubahan penanaman modal, izin usaha penanaman modal, izin usaha perluasan penanaman modal, izin usaha penggabungan penanaman modal, izin usaha perubahan penanaman modal diterbitkan oleh Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Tegal.

D. Strategi Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Dalam Meningkatkan Investasi Tahun 2015-2016

Strategi ekonomi untuk meningkatkan investasi yaitu strategi yang dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Tegal dengan mempertimbangkan faktor ekonomi daerah. Faktor ekonomi daerah berkaitan dengan keunggulan-keunggulan komparatif dan kompetitif yang ada di wilayah Kabupaten Tegal. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Tegal memperhatikan potensi ekonomi di wilayahnya, potensi tersebut mencakup fisik serta non fisik. Faktor-faktor seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, merupakan faktor yang menjadi pertimbangan terhadap daya tarik investasi di Kabupaten Tegal. Indikator pendapatan masyarakat Kabupaten Tegal juga menjadi pertimbangan investor untuk memperhitungkan kelangsungan bisnisnya di suatu daerah.

Adapun strategi pemerintah daerah Kabupaten Tegal untuk meningkatkan investasi tersebut yaitu Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal memiliki program dengan beberapa SMK di Kabupaten Tegal untuk mencetak tenaga kerja yang siap pakai. Ketika investor membutuhkan tenaga kerja maka pemerintah daerah Kabupaten Tegal melalui Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal langsung menghubungi SMK tersebut sehingga investor dapat dengan mudah mendapatkan tenaga kerja yang biaya gaji tidak terlalu tinggi dan cukup berkompeten. Pemerintah daerah Kabupaten Tegal melalui Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal mempunyai salah satu tugas pokok yaitu memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja, Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal juga mempunyai program pelatihan-pelatihan ke beberapa SMK yang ada di Kabupaten

Tegal sehingga nantinya akan saling menguntungkan bagi investor yang mencari tenaga kerja dan juga SMK di Kabupaten Tegal yang membekali siswa-siswinya siap berkerja.

Kabupaten Tegal pula merupakan salah satu daerah dengan standar biaya hidup yang tidak terlalu mahal karenanya per 2016 Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Tegal berkisar diangka Rp. 1.300.000,00. Namun dengan nilai UMR tersebut dirasa cukup karena Kabupaten Tegal berbeda jauh dari daerah-daerah lain yang standar biaya hidupnya tinggi. Hal tersebut merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki Kabupaten Tegal yang pastinya dilirik para investor karena para investor bisa mendapatkan tenaga kerja tidak terlalu mahal untuk menggajinya.

2.3. Pemetaan Potensi Ekonomi dan Subsidi Usaha

Pemetaan ekonomi merupakan salah satu yang dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Tegal di wilayahnya. Pemerintah daerah Kabupaten Tegal, dengan adanya pemetaan ekonomi dapat memberikan informasi kepada masyarakat termasuk investor mengenai potensi apa saja yang dimiliki, peluang, serta yang lebih penting adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perihal penanaman modal.

Pemetaan ekonomi bukan hanya sekedar perihal meningkatkan investasi di Kabupaten Tegal namun lebih dari itu menyangkut perencanaan pembangunan daerah dari segala aspek. Melalui Bappeda Kabupaten Tegal, pemetaan ekonomi tersebut dilakukan karena seperti diketahui Bappeda adalah SKPD pemerintah

mengenai perencanaan pembangunan daerah. Bappeda bersama BPS melakukan survei seakurat mungkin untuk mengetahui potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tegal. Ditambahkan menurut Bapak Haron Bagas Prakosa selaku Sekda Kabupaten Tegal, perihal meningkatkan investasi, investor masih belum mengetahui RTRW Kabupaten Tegal yang menyebabkan *miss communication* antara investor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Hal berikutnya yang perlu diperlukan pemerintah daerah Kabupaten Tegal dalam menarik minat investor adalah pemberian insentif kemudahan. Pemberian insentif kemudahan adalah dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Tegal kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di wilayah Kabupaten Tegal. Dalam Rencana strategis (Renstra) Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal tahun 2014-2019 dijelaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tegal dapat memberikan kemudahan berupa:

1. Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal
2. Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah daerah
3. Kemudahan pelayanan dan atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, serta bentuk-bentuk lainnya
4. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
5. Penyediaan sarana dan prasarana
6. Penyediaan lahan atau lokasi, dan
7. Pemberian bantuan teknis

Dalam praktiknya tidak sepenuhnya yang ada di dalam Rencana strategis (Renstra) Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal tahun 2014-2019 mengenai pemberian kemudahan dan insentif dilaksanakan dengan baik. Menurut kesaksian para investor termasuk investor yang bergerak di bidang tambang batu dan investor pemurnian bahwa perihal perizinan mereka masih merasa belum dipermudah karena semuanya mengalami keluhan perihal perizinan. Pemberian kemudahan atau insentif kemudahan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tegal yang dirasakan hanya penyediaan data dan informasi, dan penundaan atau keringanan pajak.

2.4. Proposal Spesifik Investasi

Sesuai penelitian yang sudah dilakukan penulis, proposal spesifik investasi tersebut pemerintah daerah Kabupaten Tegal memilikinya. Proposal spesifik investasi daerah Kabupaten Tegal dilakukan untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Tegal dalam menjelaskan potensi investasi di wilayahnya. Proposal spesifik investasi yaitu semacam dokumen yang berisi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi investasi mulai dari sosial, budaya, politik, ekonomi, infrastruktur, kondisi pasar, persaingan, dan lain-lain. Dalam menentukan strategi pembangunan ekonomi di Kabupaten Tegal untuk pertumbuhan ekonomi, investasi dan daya saing yang tinggi maka proposal spesifik investasi dibutuhkan. Proposal tersebut terdapat di Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal dan biasanya digunakan untuk bahan promosi.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

A. Strategi sosial

Menciptakan rasa aman untuk investor dengan cara menghimbau agar investor rutin melaporkan perkembangan bisnisnya serta rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Tegal agar lebih terbuka terhadap investor.

B. Strategi politik

Menjaga stabilitas politik di Kabupaten Tegal yaitu menjaga hubungan baik antara eksekutif dan legislatif pemerintah daerah Kabupaten Tegal. Misalnya saat rapat Badan Anggaran (Banggar) jika eksekutif mempunyai usulan anggaran perihal penanaman modal maka pihak legislatif langsung menyetujuinya tanpa pembahasan yang alot.

C. Strategi Administratif

Memangkas perizinan dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) Tegal Nomor 24 Tahun 2016 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Tegal. Adanya perbub tersebut maka izin prinsip yang awalnya diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal maka berpindah kewenangan penerbitan izin prinsip oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

D. Strategi Ekonomi

Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal bekerjasama dengan beberapa SMK di Kabupaten Tegal untuk melakukan pelatihan dan pembinaan sehingga

dapat menciptakan tenaga kerja yang berkompeten dan bergaji tidak terlalu mahal yaitu berkisar diangka Rp.1.300.000 sesuai Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Tegal tahun 2016.

3.2. Saran

A. Strategi sosial

Pemerintah daerah Kabupaten Tegal diharapkan lebih rutin mengadakan sosialisasi tentang arti pentingnya investasi terhadap masyarakat Kabupaten Tegal agar lebih terbuka terhadap investor.

B. Strategi politik

Diharapkan dalam penyusunan anggaran saat rapat Badan Anggaran (Banggar) porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur bagi daerah yang diperuntukan daerah investasi atau industri mendapatkan porsi cukup sehingga ada lebih banyak pembangunan agar potensi yang ada di Kabupaten Tegal dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

C. Strategi administratif

Penggabungan Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Tegal dengan Kantor Penanaman Modal (KPM) Kabupaten Tegal harus dilakukan. Restrukturisasi organisasi 2 (dua) instansi pemerintah daerah Kabupaten Tegal tersebut harus dilakukan demi menciptakan azas efektif dan efisien dan menghilangkan kesan ‘gemuk organisasi namun minim fungsi’ dan searah dengan tujuan pemerintah pusat yang sedang gencar melakukan reformasi birokrasi guna menciptakan pelayanan publik yang baik.

D. Strategi ekonomi

Pemerintah daerah Kabupaten Tegal diharapkan dapat memberikan insentif kemudahan berupa pengurangan pajak bagi para investor agar iklim bisnis di Kabupaten Tegal lebih bergairah lagi atau pemberian dana stimulan bagi para pengusaha yang kekurangan modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amins, Achmad. (2012). *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Basri, Faisal. (2002). *Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Chalid, Pheni. (2005). *Keuangan Daerah Investasi, dan Desentralisasi*. Jakarta: Kemitraan.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Fitra Zaini Mimbar. (2009). Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Dalam Meningkatkan Investasi Periode 2003-3008. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. (Tidak diterbitkan)
- Halim, Abdul. (2005). *Analisis Investasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hasan, Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Metode Penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Khoiri Ammiruddin. (2010). Strategi Peningkatan Iklim Investasi Daerah (Studi Penerapan Information and Communication Technology/ICT di Pemerintah Kabupaten Sragen). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. (Tidak diterbitkan)
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory. (1999). *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Maria Tinamberan. (2015). Peran Pemerintah Kota Bitung dalam peningkatan investasi asing di sektor pariwisata. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. (Tidak diterbitkan)

Moleong, Lexy. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mutiarin, Dyah dan Arif Zainudin (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan (Penelusuran Konsep dan Teori)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ruli Budi Wibowo. (2011). Strategi Pengembangan Investasi daerah di Kabupaten Wonosobo. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang. (Tidak diterbitkan)

Siregar, Doli D. (2004). *Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO'S Pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.

Sukirno, Sadono. (1994). *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid. (2004). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tambunan, Tulus T. H. (2004) *Transformasi Ekonomi di Indonesia; Teori dan Penemuan Empiris*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

10 permasalahan investasi di Indonesia, (2014). Dalam <http://beritadaerah.co.id/2014/12/10/10-permasalahan-investasi-di-indonesia/>. Diunduh 10 Desember 2014.

Doing Business 2016, (2015). Singapura Nomor 1, Indonesia 109. Dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/28/093653426/Doing.Business.2016.Singapura.Nomor.1.Indonesia.Posisi.109>. Diunduh 28 Oktober 2015.

Download UU Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, (2015). Dalam <http://pemerintah.net/download-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintah-daerah/>. Diunduh 29 Januari 2015.

Enam Daerah Di Jateng Berebut Penghargaan Pro Investasi, (2016). Dalam <http://semarang.bisnis.com/read/20160812/8/88856/enam-daerah-di-jateng-berebut-penghargaan-pro-investasi>. Diunduh 12 Agustus 2016.

Mengapa Lima Daerah Ini Menolak Pelayanan Satu Pintu?. Dalam <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/03/15/090650121/Mengapa-Lima-Daerah-Ini-Menolak-Pelayanan-Satu-Pintu>. Diunduh 15 Maret 2015.

Pertumbuhan Ekonomi Ditarget 5,8 Persen, (2015). Dalam <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pertumbuhan-ekonomi-ditarget-58-persen/>. Diunduh 26 Maret 2015

Transparansi Pengelolaan anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal, (2015). Dalam <http://keuagandaerah.tegalkab.go.id/index.php/raperda-apbd/category/53-raperda-apbd-tahun-2015>. Diunduh 29 Januari 2015

Transparansi Pengelolaan anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal, (2015). Dalam <http://keuagandaerah.tegalkab.go.id/index.php/raperda-apbd/category/69-raperda-apbd-2016>. Diunduh 14 Oktober 2015